

Jurnal Ekonomi study pembangunan

Volume 14, nomer 1, April 2020

KEBIJAKAN FISKAL DI NEGARA INDONESIA YANG MENCAKUP PERSPEKTIF EKONOMI

ISLAM : STUDI KASUS UNTUK MEMBERANTAS KEMISKINAN DI NEGARA

Achmad Ramadani Falah

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Raya Gelam No.250, Pagerwaja,Gelam,Kec. Candi,

Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur 61271.

Abstract

Efforts to bring out the poverty can be formulated in one sentence, namely ' to give to the poor families or families and communities to overcome their problems independently, the poverty in Indonesia is not bound by the problem of Buudaya or ADAT, the country to manufacture this fiscal policy to orient to cope with the poverty in the state. Judging from the angle of culture, Islamiyah has been recommissioning to make the role of each individual in strengthening the life of living and to create a cohesion of sociall through Zakad, Infaq or Shodaqah. In Islam has been a sentimenl role in the state to create goods for income and income in a fair and average. In the progress of community facilitors in finding solutions so that there is no longer the name of the poor people.

Abstrak

upaya untuk mengentaskan kemiskininan dapat di rumuskan dalam satu kalimat,yaitu ' memberikan kepada keluarga yang kurang mampu atau keluarga miskin dan masyarakat untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri, kemiskinan di Indonesia ini tidak terikat oleh masalah buudaya ataupun adat, Negara membuat kebijakan fiskal ini untuk berorientasikan guna menanggulangi kemiskinan di Negara. Dilihat Dari sudut paandang budaya, islamiyah telah merekomondasikan untuk menjadikan peranan disetiap individu dalam menguatkan kwaanlitas hidup serta untuk membuat kohesi sosiall melalui zakad, infak maupun shodaqah.dalam agama islam sudah meletakkan peran yang sentimenl dari Negara untuk meciptakan barang untuk pendapatan dan penghasilan secara adil dan rata. Dalam proses kemajuan fasilitor masyarakat dalam mencari solusi agar tidak ada lagi yang namanya rakyat miskin.

PENDAHULUAN

Dalam Negara memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi untuk merumuskan suatu kebijakan. Dimana yang kebijakannya selalu bersinggung langsung dengan masyarakat di bidang ekonomi, kebijakan fiskal termasuk salah satu kebijakan yang berperan penting di dalam masyarakat, yang dimana Negara berperan sebagai wadah untuk masyarakatnya guna mencari pekerjaan.

didalam sejarah islamiyah, Negara berfungsi untuk pemegang peranan yang sangat sentimental didalam mengatur kebijakan fiskal yang telah dibangun berdasarkan prinsip kesejahteraan rakyat. Peranan Negara yang berbentuk sejarah islamiyah diatas masalah ini yang di atur oleh institusi baitul mal, di dalam baitul mal harta di kumpulkan dan dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan dan guna di belanjakan untuk membayarkan jasanya yang di berikan untuk Negara, dalam merentaskan kemiskinan ini harus mengadakan lapang kerja yang cukup banyak, pembangunan infrastruktur dan untuk pelayanan public serta lainnya.

Di Negara Indonesia ini, melalui peraturan presiden nomor 18 tahun 2007, yang menjadikan tujuan utama untuk membangun perekonomian setiap tahunnya untuk Negara di arahkan mendorong perkembangan luas perekonomian yang bertujuan meluaskan lapang kerja agar tingkat kemiskinan berkurang di Indonesia. tujuan utama untuk perkembangan perekonomian di Indonesia adalah pertumbuhan yang bertingkat kualitas tinggi dan yang dapat mendistribusikan pendapatan untuk lapangan kerja. Untuk mepercepat perluasan lapangan kerja di arahkan menuju tingkatan perluasan pada sector yang banyak membutuhkan pekerjaan. Untuk merentaskan kemiskinan, harus focus pada bidikan yang dapat meningkatkan penghasilan yang sama rata dan membangun akses yang baik untuk masyarakat sekitar seperti mendapat air yang jernih, serta terhindar dari limbah yang berbahaya.

untuk merancang kegiatan ekonomi di Negara supaya terjaga stabilitasnya serta untuk mensejahterakan rakyat, supaya bisa mendorong dalam merentaskan persoalan kemiskinan serta yang belum mendapatkan kerja, setidaknya fungsi dari pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu berupaya untuk melakukan peningkatan keadilan yang berkenaan dengan distribusi pendapatan antar kelompok dalam masyarakatnya.

Dalam hal ini kebijakan Negara Indonesia dapat berakibat munculnya masyarakat dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi, mengisolasi, ketidakberdayaan dan ketidaan akses kepada sumber daya alam, kelompok miskin ini sulit untuk dijangkau oleh pemerintah sebab itu dalam penelitian kali ini bertujuan untuk merentaskan atau memecahkan kemiskinan berdasar pengetahuan lokal.

Jika dalam pemerintah pengeluaran terlalu banyak daripada pemasukan perpajak dalam periode yang di tentukan, biasanya dalam setahun, pemerintah dapat mengalami defisit atau kerugian anggaran. Dalam membiayai defisit anggaran pemerintah melakukan peminjaman, jika pemerintah mendapatkan surplus anggaran, bebahan hutang negara relative sedikit.

bersama ini, kebijakan fiskal yang mengatur pengolahan uang Negara serta batas untuk sumber yang menerima alokasi pengeluaran Negara yang sudah tertera pada anggaran pendapatan dan belanja Negara. pendapatan Negara diantaranya : penghasilan bea&cukai, devisa dari Negara, hasil dari perpajakan, hasil dari pajak bumi, impor serta masih banyak lagi lainnya. Sedangkan pengeluaran Negara meliputi : perbelanjaan senjata, untuk proyek pemerintah, pesawat, pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya yang berhubungan dengan masyarakat.

Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ini merupakan salah satunya sebagai sub bidang untuk pengelolaan keuangan Negara yang demikian begitu luasnya dan di samping itu pengelolaan moneter, dan subbidang kekayaan Negara Indonesia.

PEMBAHASAN

Kebijakan fiskal menurut pandangan islam

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan suatu program atau tujuan yang di jalankan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk merubah sistem perpajakan serta merubah sistem perbelanjaan guna memenuhi pemasukan/dana agar bisa memberikan fasilitas ataupun infrastruktur untuk masyarakat.

Kebijakan fiskal sejak dulu sudah ada pada zaman rasullah dan khulafaur rasyidin kemudian dijabarkan/disebar luaskan oleh para ulama, di zamannya rasulullah SAW dari sisi penghasilan APBN yang meliputi antara lain adalah kharaj atau sejenis pajak tanah dan zakat, jika dilihat dari pengeluaran meliputi antara lainnya untuk melakukan dakwah, pendidikan serta para belanja pegawai.

sejarah islamiyah ini kebijakan fiskal menepati tempat yang strategis dalam rangka pembangunan tata pengelolaan keuangan dalam Negara yang sudah terencana dan tepat arah. terdapat buku yang berisikan tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam pandangan islam. Andiwarman Karim berkata bahwa tak instrumental kebijakan fiskal ini yang terekam dari awal pemerintahan islam. antara lain:

1. Kebijakan dalam anggaran

Di dalam penyusunan anggaran Negara, yang selalu di prioritaskan guna pembelanjaan yang terarah untuk kebersamaa atau kepentingan bersama. yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. waktu zaman rasulullah dalam mengatur APBN di lakukan sangat cermat, efisien dan efektif, sehingga jarang sekali terjadi defisin anggaran yang turun meskipun terjadinya peperangan.

2. Untuk meningkatkan pendapatan nasional serta untuk meningkatkan partisipan dalam bekerja

Rasulullah yang menjabat sebagai pimpinan ia banyak menguasai beberapa langkah dalam melaksanakan rencana yang bertujuan untuk melakukan pembangunan untuk masyarakat luas. Untuk meningkatkan pendapatan nasional Rasulullah menjadikan golongan muhajirin dan golongan anshor sebagai kunci keberhasilan. Dalam persaudaraan yang dijalin menyebabkan terjadinya distribusi serta berimplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan yang total dari kota Madinah. Selain itu persaudaraan berdampak positif diantaranya golongan muhajirin dan golongan anshor adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan, yang pertama bagi orang-orang muhajirin.

3. Kebijakan fiskal khusus

Untuk menerapkan Kebijakan fiskal secara khusus ini Rasulullah melakukan yang berlandaskan untuk persaudaraan. Ada berbagai cara untuk menerangkan kebijakan fiskal yang diterapkan seperti:

1. memberi pertolongan dengan ikhlas guna memenuhi kebutuhan hidup kaum muslim yang dalam keadaan kekurangan.
2. meminjamkan alat-alat yang berasal dari kaum non-muslim dengan Cuma-Cuma, serta ada jaminannya untuk mengembalikannya dan mengganti rugi jika adalecet, rusaknya peralatan.
3. meminjamkan uang-uang tertentu untuk diberikan ke mu'allaf.
4. menerapkan kebijakan intensif guna untuk menjaga pengeluaran serta dapat meningkatkan partisipasi pekerjaan dan produk hasil kaum muslim.

4. Kebijakan untuk perpajakan

Rasulullah menerapkan kebijakan seperti kharaj, khumus, jizyah dan zakat. Penerapan ini untuk menciptakan/menstabilkan harga serta untuk mengurangi tingkat inflasi. Perpajakan dapat mendorong kestabilan penghasilan dan total produksi saat terjadinya stagnasi serta menurunnya permintaan dan tawaran untuk agregat, kebijakan ini tidak juga menyebabkan hal terjadinya turunnya harga maupun hasil dari produktifitas.

Salah satu urusan bagi makhluk sosial yang telah dilaksanakan oleh negara yaitu untuk mengatur perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara juga memiliki kewajiban atas rakyatnya yaitu melayani dan mengurus urusan rakyatnya.

Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini selalu berupaya dalam mengentaskan kemiskinan rakyat-rakyatnya, salah satu persoalan yang sangat fundamental yang tengah dihadapi yaitu tentang persoalan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Sudah Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun perekonomian sebanyak 230 juta manusia di Indonesia serta perekonomian tanah air yang memiliki luas 9 juta Kilometer persegi serta pemerintah telah melakukan yang berdampak pada angka penurunan kemiskinan dari 17,5% pada tahun 2003 menjadi 15% pada Nopember 2008. Pada tahun 2009 angka kemiskinan mencapai 3,53 juta jiwa turun menjadi 1,95 juta jiwa dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2007 silam.

Angka untuk pengangguran pun ikut turun dari 8,8% pada tahun 2004 menjadi 7% pada per february 2009 silam. Kita dapat melihat bahwa angka kemiskinan yang berdasarkan pengeluaran yang mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari hasil yang kita lihat, pemerintah Indonesia sudah terlihat sangat kerja keras dalam mengurangi atau menanggulangi warga miskin.

Tetapi sangat tidak etis kesannya dan terkesan terlalu egois apabila semua ini tentang turunnya angka kemiskinan di anggap dari jerih payah pemerintah itu sendiri, karena masyarakat miskin itu sendiri untuk bisa keluar dari jebakan kemiskinan dan peran dari masyarakat sipil. Dalam hal mengurangi kemiskinan kita harus melihat seberapa banyak kah kita mampu untuk menjawab masalah yang dihadapi oleh kelompok miskin dan kendala uang harus dihadapi untuk program itu. Dengan hal ini yang kita kektahui sekarang, kemiskinan adalah sebagai suatu fenomena social.

Kemiskinan termasuk menunjukkan penghasilan rendah, kondisi kesehatan, serta lingkungan yang kotor tetapi juga ketidakberdayaan dan ketergantungannya pada pihak lain. Suatu program dalam menanggulangi kemiskinan yang harus diluncurkan dapat disaksikan dari kemampuan dalam program tersebut.

Dalam pandangan perekonomian islamiyah, dalam persoalan yang mencakup persoalan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan ada beberapa cirinya seperti:

1. Untuk menumbuhkan peranan-peranan dalam dengan sendirinya untuk mengajukan kualitas hidup yang sesuai dengan harkat dan martabat seseorang yang dimuliakan oleh tuhan.
2. Dalam mengembangkan proses bersama harus mengasih kesempatan untuk seseorang yang mempunyai kreatifitas tinggi, inovasi, serta pekerja keras dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Masyarakat menciptakan distribusi kekayaan serta pendapatan masyarakat yang secara adil dan merata seluruhnya.
4. Masyarakat harus menjaga kestabilan serta keberlangsungan perkembangan perekonomian didalam proses kamajuan.

Upaya dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan cara merumuskan didalam satu kalimat yang berbunyi”berikan sebanyak peluang untuk kepala keluarga yang miskin serta teman-temannya guna mengatasi permasalahan ekonomi mereka secara mandiri”. Pemerintah harus mengatur posisinya kembali dalam peranan mereka.

Dari fakta yang kita peroleh pemerintah tidak bisa lagi berbuat banyak dalam mengentaskan angka penurunan kemiskinan tanpa menggandengkan tangannya,serta usaha dari masyarakat-masyarakat miskin agar bisa keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan ekonomi politik di dalam islam

Menurut ahli yang menangani masalah kemiskinan mereka mengatakan ada beberapa sifat terpenting yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di antaranya yaitu:

1. Kurangnya sarana dan prasarana di desa-desa terpencil.
2. Kurangnya sumber daya alam di daerah tersebut.
3. Kurangnya teknologi dan unsur-unsur pendukungnya.
4. Kurangnya sumber daya manusia.

Di dalam konteks kemiskinan Indonesia ada 4 klausul yang potensinya menyebabkan kesulitan untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu:

1. Ketidak seimbangannya laju dalam pertumbuhan di antara sektor ekonomi yang mengakibatkan prefensi rencana pembangunan yang kurang tepat ataupun tidak sesuai. Industri yang didukung oleh pemodalana cukup besar sudah di investasikan kepada investor yang tak cepat selesai, pada kenyataannya telah banyak sekali dana yang telah digelontorkan demi disuntikan untuk pembangunan.keluar dari konteks itu, pada dunia perusahaan yang akan dikembangkan kenyataannya konsep pasarannya kurang mendukung , karena itu berdampak kepada munculnya kebijakan seperti monopoli.
2. Dalam ketimpangan saat pemberharuan atau pengembangan dalam bidang ekonomi akibat dari kurang berhasilnya dalam pengembangan serta pemberharuan telah mendukung dan ada peraturan mengenai pengembangan dalam lingkup industry tanap melibatkan pihak yang sudah tidak membantu lalu yang mengakibatkan banyak orang bermasalah dalam kesenjangan sosial . Akbitanya permasalahan ini satu diantaranya yang mengakibatkan ketimpangan akibat kesenjangan sosial di masyarakat secara akut, yang pada mana hanya memberikan keuntungan sedikit yang di huni oleh sedikitnya pegawai kerja , dan timbal baliknya di dalam masalah pendanaan ini membutuhkan modal yang terbilang banyak dan mahal namum jika bisa hemat dalam pengeluaran.
3. Pada dasarnya keterkaitan diantara daerah yang perekonomian rendah dan tinggi yang akibat peraturan yang ditetapkan pemerintah hanya memperhatikan ekonominya hanya kepada daerah yang hasil ekonominya tinggi. Dalam peraturan ini daerah dengan perekonomian tinggi di posisikan sebagai pemasok berbagai kebutuhan

manusia dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, sedangkan itu daerah dengan perekonomian rendah di sana mereka harus membeli barang dari daerah berpenghasilan ekonomi yang tinggi atau kepada pemasok barang dan harga agak mencekik atau mahal

4. Dalam kekuatan kelompok di industry dan sektor marjinal seperti pedagang, petani, dan tukang kebersihan jalan yang tidak seimbang ini, maka keadaan ini dirasa kurang adil menjadi kurang seimbang. Berikut contohnya, beberapa sektor mengambil keputusan untuk impor yang menyebabkan hutang dari hasil impor tersebut dan impor menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia

Kemiskinan ekonomi politik di dalam islam yang berkesinambungan ketidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh yang meliputi sandang, pangan, dan papan memerlukan usaha keras yang mempunyai hasil besar untuk mengurangi kemiskinan ini. Syekh An-Nabhani mengategorikan beberapa macam ciri orang miskin dalam pandangan islam untuk mengelolah perekonomian dalam pencapaian kehidupan di muka bumi ini dan di ahkirat, yaitu:

1. Tazkiyyah yaitu bersucisemacam mengeluarkan zakat atau bisa dimaknai dengan membuat sesuatu suci atau baik dari segi keyakinan maupun fisik, sesama makhluk hidup, serta alam lingkungannya. ini dalam rana perekonomian ini sangat membantu karna orang yang mampu dapat mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk membantu hegara dan masyarakatnya.
2. Tauhid, yang berarti berpegang dalam agama islam yang mengajarkan bahwa allah itu esa tidak ada yang patut disembah selainnya yang bermakna dalam kaidah islam pada pembangunan ekonomi bersyariat islam yang di dasarkan kepatuhan kepada allah itu langsung maupun dengan manusia.
3. Uluhiyah Allah berarti mengesakan segala bentuk beribadah kepada Allah dan bertawakal seta beriman kepadanya bernafaskan islamiyah. sebagai dasar tujuan hidup yang sesuai tuntunan yang telah diajarkan oleh allah pembangunannya serta agar setiap individu mampu membantu orang lain dalam hal yang baik.
4. Imamah yaitu menerangkan di mana setiap zaman atau peradaban paasti ada seorang pemimpin ini yang akan bertanggung jawab pada setiap kepemimpinannya dari Allah dan kepada wilayah yang dipimpin pada perekonomian, akhlak, dan keagamaan.

Kebijakan fiskal dalam negara

Dalam kebijakan fiskal, Negara mengatur dalam bidang pengelolaan keuangan yang demikian begitu luas. Disamping bidang yang menyakut perekonomian dalam pengelolaan kekayaan alam dalam masyarakat maupun negara. yang ada dalam bidang pengelolaan kekayaan alam dan beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Fungsi dalam mengatur fiskal

Dalam fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi penataan untuk catatan anggaran dari pemerintahan. Dan untuk pembangunan serta perkembangan infrastruktur bagi masyarakat. Mengembangkan ekonomi merupakan langkah dalam bekerjasama dengan berbagai wilayah dan aspek serta untuk merencanakan anggaran keuntungan yang didapat dalam kegiatan ini oleh pemerintah.

2. Makna fiskal dalam anggaran

Di dalam fungsi anggaran kebijakan fiskal mengatur dalam penyiapan, perumusan, pelaksanaan serta strategi dan evaluasi dalam hal ini kepada pemerintahan.

3. kebijakan fiskal dalam administrasi pajak

Pajak termasuk instrumen paling efektif di dalam kebijakan fiskal, karena untuk meningkatkan pembangunan Negara serta pemerintah bisa mengatur penerimaan dalam Negara yang berbentuk pajak dengan cara menaikkan perpajakan dengan tujuan guna pembatasan konsumsi atau pemberian subsidi kepada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang dan untuk menurunkan pajak yang berguna untuk meningkatkan daya beli para masyarakat.

4. Fungsi kebijakan fiskal sebagai administrasi belanja Negara

Administrasi Negara berfungsi untuk membangun infrastruktur yang memadai guna masyarakat agar perkembangan ekonomi lebih cepat untuk tercapainya. Di dalam peranan belanja Negara yang sebagai instrument dalam kebijakan fiskal yaitu untuk menaikkan belanja Negara yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan membuka luas lapangan kerja serta meningkatkan penghasilan masyarakat baik di bidang jasa ataupun buruh. DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

5. Fungsi kebijakan fiskal dalam mengatur stabilisasi

Fungsi ini berguna untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi yang lewat kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintahan. seperti menyediakan lapangan kerja yang sangat luas agar para pengangguran mendapatkan kerja serta meningkatkan ekonomi keluarga mereka yang kurang membutuhkan.

6. Fungsi kebijakan fiskal dalam pembendaharaan keuangan Negara

Dalam fungsi ini bendahara Negara mengatur dan merumuskan kebijakan serta mengatur pemasukan dan pengeluaran Negara. selain itu bendahara Negara juga mengatur pengelolaan kas Negara dan pengelolaan hutang baik dalam negeri ataupun luar negeri.

Jenis kebijakan fiskal di bagi dua bagaian yaitu :

1. Kebijakan ekspansif yang berarti kebijakan implementasi untuk menaikkan pengeluaran pemerintah dan untuk menurunkan penerimaan pajak.
2. Kebijakan kontraktif yang berarti kebijakan implementasi yang menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak atau kebalikkanya dari kebijakan ekspansif.

Kebijakan fiskal di Indonesia dari masa ke masa

Pada masa lampau atau pada sejarah, Indonesia memang tak banyak dipungkiri lagi bahwasannya pertumbuhan ekonominya dari masa ke masa memang sudah melaju sangat cepat. Tetapi jika di telusuri kembali dalam lembaran sejarah ekonomi Indonesia, yang terutama pada masa orde lama, pembangunan perekonomian Indonesia relative statis.

Dalam era reformasi ini, tidak berarti dengan pindahnya pemegang kebijakan yang beralih pula kondisi perekonomiannya di Indonesia, dari yang terpuruk menjaadi sejaterah, tetapi persoalan perekonomian tidak akan pernah bosan untuk menyapa bumi pertiwi ini. setidaknya terdapat tiga isu hangat yang sering di perbincangkan kaitnnya dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Yang di maksud ketiga isu tersebut adalah :

1. Utang dari luar negeri

Pada tahun 1997 negara Indonesia menjabat sebagai anggota IMF menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan, malah semakin menghancurkan atau menenggelamkan Indonesia dalam jeratan hutang yang makin bertambah. Beban dari hutang ini akan berdampak pada mengingkatnya kesengsaraannya rakyat, dan fasilitas publik pun yan seharusnya bisa di sediakan malah menjadi berkurang karena dananya digunakan untuk melunasi hutang secara perlahan serta bunganya.

Jika hutang makin banyak maka makin banyak juga bunganya, di dalam hal ini pemerintahan terpaksa memberlakukan perpajakan yang sangat tinggi guna memenuhi kewajiban fiskalnya. Dalam naiknya pajak sangat berpengaruh atau berdampak pada masyarakat kecil dan naiknya harga- harga barang produksi. Kementerian keuangan mencatatkan total hutang pemerintah RI per 31 desember 2010 sudah mencapai Rp1.676 triliun.

Pada januari 2011 Direktorat Jendral, kementerian keuangan mencatat bahwa angka tersebut merupakan angka yang bersifat sementara.

2. Prediksi untuk besarnya anggaran negara

Didalam bergejolaknya nilai kurs rupiah terhadap dolar amerika serikat, yang sudah menguncang sendi dasar perekonomian makro di Indonesia yang sudah dirancang sejak lama. Harga minyak dunia yang harganya mencapai angka paling

tinggi selama daswarsa wilayah Indonesia. Dalam bergejolaknya besaran makro perekonomian tidak jarang juga yang akan mengancam prediksi angka yang telah ditetapkan diawal pelaksanaan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunan. Dalam konsekuensi uraian diatas yang menunjukkan bahwa sulitnya untuk membuat angka prediksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini. Yang terpenting saat ini harus bisa meminimalkan gejolak yang terjadi atau memperkokoh kondisi perekonomian makro di Indonesia dan dimasa yang akan datang.

3. Subsidi Bahan Bakar Minyak

Didalam persoalan subsidi BBM yang mencakup soal besarnya jumlah subsidi dan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan. Kementrian energy dan sumber daya mineral (ESDM) yang mendata subsidi Bahan bakar mesin pada tahun 2011 yang sebesar 182persen terhadap subsidi BBM pada tahun 2010. Pada tahun 2010 volume BBM bersubsidi yang mencapai angka 37,2 juta kl yang sudah melampaui kuota APBN yang sebesar 35,5 juta Kiloliter.

BBM bersubsidi 2008 sebanyak 38,7Kl yang termasuk dalam realisasi.

Transportasi darat merupakan pengguna terbesar dari subsidi yang mencapai angka 89% atau 32,48 juta Kl. Transportasi darat lebih dominan mengkonsumsi premium seperti mobil pribadi yang di dominasi mencapai angka 53% / 12,3 juta Kiloliter untuk mengkonsumsi premium guna transportasi .

Di sektor transportasi darat dominannya mengkonsumsi premium yang di nilai kebanyakan belah pihak, termasuk pemerintah yang menyatakan tak mencerminkan keadilan. Keetidakadilan ini telah banyak mengakibatkan yang semakin melebar ketimpangan perkonomian antar penduduk diantara Negara Indonesia.

Kebijakan fiskal Negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan

Kemiskinan yaitu ketidakmampuan dalam individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kemiskinan termasuk dalam sebuah keadaan maupun kondisi yang berada dalam garis nilai standart pencapaian yang maxsimal. Dalam kamus KKBI, kata”miskin itu berarti tidak berharta benda yang serba kekurangan atau yang memiliki penghasilan rendah”.

Kemiskinan memiliki arti kata “miskin” dan “fakir”. Yang di maksud fakir ialah seseorang yang sangat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan berpenghasilan sangat rendah.

Kebijakan pemerintah dalam anggaran untuk bertempat diposisi yang sentral untuk mengubah wajah-wajah kemiskinan serta kesengsaraan. Di Indonesia permasalahan kemiskinan

sangat tinggi dan besarnya kesenjangan merupakan indikator kegagalan suatu Negara dalam membangun proses. Karena pembangunan yang dilaksanakan pada prinsipnya harus ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan taraf hidup masyarakat.

Dalam ini sudah sesuai dengan tujuan dari Negara Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, yang sebagai mana di amanatkan dalam pembukaan undang-undang 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

kesejahteraan rakyat yang dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan secara terprogram yang sudah dimulai sejak orde baru dengan meluncurkan program pelita I sampai pelita V dan repelita VI yang diluncurkan untuk program khusus yaitu program inpres desa tertinggal. Inpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan tentang masalah kemiskinan yang secara berkelanjutan didesa miskin.

masih banyak lagi program lainnya yang secara signifikan dapat diketahui dengan menyibak pos anggaran yang disediakan oleh APBN.

Ada 3 program-program untuk menanggulangi kemiskinan :

1. Pengembangan ekonomi lokal
Untuk Pengembangan ekonomi lokal ini di prioritaskan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan pendayagunaan potensi sumber daya lokal ini dan pemerintah fokus untuk mempercepat pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan jalan-jalan umum dan infrastruktur lainnya.
2. Pemberdayaan seperti usaha mikro,kecil, dan menengah atau di sebut juga UMKM
Dalam pemberdayaan ini masyarakat di tuntut agar bisa membuat kreatifitasnya sendiri secara mandiri tetapi masyarakat miskin mendapatkan dana bantuan dari pemerintah guna memajukan usaha-usaha kecilnya agar terus berjalan secara lancer dan dapat meningkatkan ekonomi mereka secara perlahan.
3. Pemberdayaan untuk kesehatan masyarakat
Program kesehatan ini di biayai oleh APBN, masyarakat dapat memeriksakan kesehatanya secara gratis di pukesmas terdekat dengan syarat menggunakan kartu BPJS. Program ini tidak di hanya di berlakukan di pukesmas tetapi juga bisa di pergunakan di rumah sakit yang dimana masyarakat miskin yang berobat kerumah sakit akan di beri keringanan. Pendataan untuk mengurangi warga miskin selalu menanjak dari tahun ke tahun, dalam pelaksanaan sering kali keterkaitan antara program penanggulangan kemiskinan yang dipusat maupun didaerah yang belum optimal. Pada APBD anggaran penanggulangan

kemiskinan secara umum masih belum memadai yang rata-rata berkisar 8-12 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

Pemerintah melakukan berbagai upaya cara untuk melakukan pelaksanaan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, saat ini pemerintah memiliki berbagai cara antaranya yaitu:

1. Pemerintah tetap mempertahankan program lamanya seperti dana BOS, asuransi, dan raskin.
2. Pemerintah mendorong APBD provinsi, kabupaten serta kota-kota setiap tahunnya dan untuk meningkatkan anggaran untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di negara serta harus memperluas lapangan pekerjaan agar pengangguran cepat untuk mendapatkan kerja.
3. Pemerintah mempertahankan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga di bidang bahan pokok seperti beras.

Pemerintah memiliki langkah kongkrit untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang telah di jabarkan di dalam berbagai program yang di harapkan untuk menjadi instrument utama di dalam kegiatan tersebut. Contoh program yang di laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menggunakan program pengembangan (EBN). Di dalam program ini di maksudkan guna individual masyarakat dalam penyediaan energi terbaru dengan memperluas atau membangun “ desa mandiri energi”
2. Pemerintah memberlakukan program keluarga harapan atau biasanya di sebut dengan PKH, program ini berupa bantuan khusus dari pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan.
3. Program lainnya dari pemerintah yaitu bertujuan untuk memberi akses masyarakat kecil atau miskin kepada sumber permodalan usaha makro dan kecil,sertifikat rumah/tanah serta listrik-listrik di pedesaan terpencil,
4. Pemerintah juga memberlakukan program nasional untuk pemberdayaan masyarakat mandiri yang merupakan ekspansi dan intergrasi dari program-program untuk menanggulangi kemiskinan.

Di tahun 2008 lalu, sebagaimana yang di terapkan oleh pemerintah tentang di gariskan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2008(RKP 2008) yang melalui perpres nomer 18 tahun 2007, pemerintah mempertujukan pembangunan ekonomi yang diarahkan langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka guna memperluas lapangan pekerjaan dan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara.

Dari sasaran pertumbuhan ekonomi pemerintah mengharapkan pertumbuhan yang berkualitas seperti pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan kerja. Sedangkan

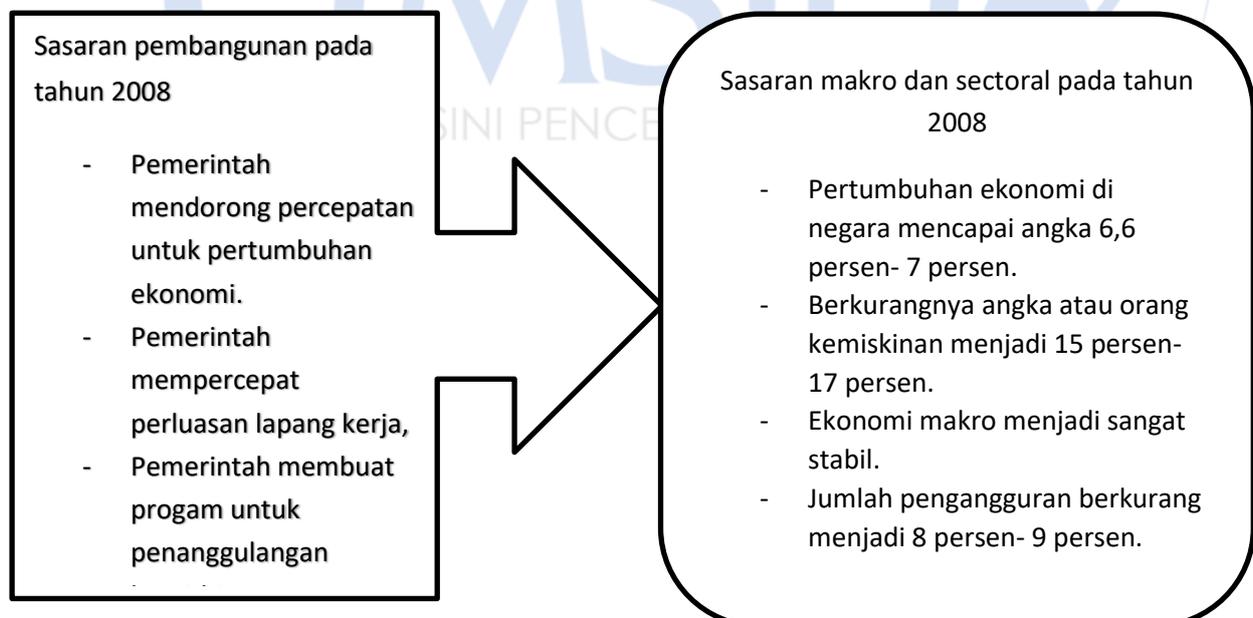
untuk mempercepat perluasan lapangan pekerjaan pemerintah langsung mengarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor yang banyak untuk menyerap tenaga kerja.

Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah berfokus yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan secara menyeluruh dan untuk diberikan akses yang sangat luas untuk masyarakat kecil serta mendapatkan pendidikan yang layak, air bersih/air PDAM, serta kesehatan, dengan adanya itu masyarakat kecil bisa hidup lebih dari berkecukupan.

Di tahun 2009, pemerintah merumuskan untuk lokasi dana anggaran negara untuk mensupport dalam melaksanakan tema pembangunan pada tahun 2009 yang berisikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat juga mendukung pembangunan pada tahun 2010 ialah: untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sebesar 7% dan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat dari 11% – 13 %.

Dalam tingkat pengangguran juga turun dari 6,0 %- 0,7 %, pemerintah meningkatkan untuk pembangunan desa- desa serta mempercepat pertumbuhan yang sangat berkualitas dengan menggunakan cara memperkuat daya tahan ekonomi yang telah di dukung oleh pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pembangunan pertanian dan harus menetapkan anti korupsi di desa- desa agar pembangunan tetap lancar tidak ada kendala dan mempertahankan keamanan dalam negeri,

Di dalam kebijakan belanja negara pada tahun 2011-2015 yang di dukung dengan biaya prioritas pembangunan pada tahun 2011-2015 guna untuk meningkatkan jalannya pertumbuhan ekonomi, untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi angka- angka kemiskinan.



Pemerintah juga mendukung beberapa program prioritas dalam pembangunan nasional jangkah menengah yang di antaranya yaitu:

- Remormasi birokrasi dan tata pengelolaan
- Pembangunan pendidikan
- Pembangunan kesehatan
- Pembangunan infrastruktur
- Pembangunan untuk daerah yang tertinggal
- Pembangunan untuk lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
- Pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan
- Pembangunan kreativitas serta inovasi teknologi

Menteri perancang pembangunan nasional Bapenas , Armidaa S. Alisjahbana mengatakan bahwa anggaran untuk penanggulangan masyarakat miskin dalam kurun waktu 2009-2013 yang berjumlah sebesar Rp270 triliun. Pemerintah juga membuat kebijakan dan untuk progam penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga kluster.

Pada kloster yang pertama, yaitu klaster untuk bantuan serta perlindungan social kelompok sasaran, pemerintah juga memberikan bantuan yang melalui penyediaan berupa beras untuk rakyat miskin atau yang biasanya disebut dengan bantuan raskin, program keluarga harapan, bantuan dana BOS, dan bantuan bagi lanjut usia serta cacat ganda terlantar. Bantuan yang langsung berupa tunai yang sebagai kompensasi kenaikan harga dari BBM dan juga beasiswa untuk anak dari rumah tangga sasaran.

Pada kloster yang kedua yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau disebut juga dengan PNPM. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk pendampingan dan pemberdayaan didesa-desa.

Yang kloster ketiga yaitu dimana kloster pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta untuk perbaikan iklim berusaha dan untuk penyediaan kredit usaha rakyat atau disebut juga kur, pemerintah juga telah meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKN). Kemiskinan adalah multi sector problem yang membutuhkan upaya untuk penanganan lintas sectoral sehingga koordinasi perlu ditingkatkan kembali.

KESIMPULAN

KESIMPULAN

Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas,bahwa beragam progam yang di luncurkan pemerintah untuk merentaskan kemsikinan, memang masih banyak adanya dugaan yang signifikan dalam acuan poaitif untuk merentaskan kesenjangan sosial namun indikasinya/progamnya kurang berjalan dengan lancar dan tidak sesuai harapan. Pemerintah juga harus gerak cepat dalam memperluas lapang pekerjaan agar masyarakat miskin dapat penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya.

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat adalah keadaan yang sangat gampang dijumpai diberbagai daerah diindonesia maupun Negara lain bukan hanya kesenjangan sosial tetapi juga problema yang lainnya dab]n bagaimana pemerintah bisa menerapkan beberapa kebijakan untuk merentaskan kemiskinan sudah terjadi. Islam juga menganjurkan untuk

menumbuhkan peran kemanusiaan untuk menaikkan taraf kehidupan dan kelayakan rasa kebersamaan semua orang seperti berdonasi, maupun zakat.

Islam juga memiliki peranan yang sentral untuk supaya keuangan yang didapatkan umat islam merata guna menciptakan kestabilan berlangsungnya kemajuan perekonomian manusia guna mendapatkan kualitas kehidupan yang baik.

DAFTAR PUSTKA

Afzalurrahman.1995. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 1, Yogyakarta.

<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/>

<http://journal.umy.ac.id>

<http://quipper.com>

Supriyanto. 2005. Analisis tentang persoalan kebijakan fiskal di Negara Indonesia di era reformasi.

